

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SOEDONO MADIUN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FINARIAWAN ASRINING SANTOSA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 882568

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 9.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/475 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 632.000.000

1. MOBIL, NISSAN X-TRAIL/MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, MAZDA MAZDA3/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA REBEL/SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, YAMAHA N-MAX/SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO/SEPEDA MOTOR R2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 420.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 274.616.849**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 10.826.916.849**III. HUTANG** Rp. 689.550.734**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 10.137.366.115



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.